Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	8

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kudus

Halaman 13

DPRD Minta Pencairan Bankeu Desa Ditunda

KUDUS– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Ilwani meminta alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk desa di tahun 2018 ini ditunda pencairannya. Desakan tersebut dilakukan lantaran ada banyak ketidakpatutan dalam pengalokasian anggaran tersebut.

"Kami minta agar Pemkab menunda proses pencairan Bankeu tersebut," kata Ilwani, Senin (3/9).

Ilwani mengatakan, alokasi bankeu yang totalnya mencapai sekitar Rp 11 miliar tersebut, disinyalir banyak kejanggalan. Salah satunya adalah ada banyak proyek yang menumpuk di satu desa, sementara desa-desa lain justru tidak mendapat alokasi.

Dicontohkan Ilwani, di Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, setidaknya ada sekitar 7 titik proyek yang mendapat alokasi Bankeu. Padahal, secara infrastruktur, desa tersebut sudah terbilang cukup bagus dibandingkan desa-desa lainnya.

Ilwani mengatakan, pihaknya tak ingin mengambil resiko jika alokasi Bankeu tersebut tetap dicairkan. Karena, hal tersebut rentan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

"Terus terang saya khawatir jika nanti ada KPK atau Kejaksaan yang kemudian turun untuk menyelidiki penggunaan anggaran ini," kata Ilwani.

Lebih lanjut, kata Ilwani, alokasi Bankeu sebenarnya sangat positif untuk mempercepat pembangunan di desa. Dengan dana Bankeu, desa bisa melakukan pembangunan fisik terhadap insfrastruktur yang dirasa masih kurang bagus.

Secara pelaksanaan, Bankeu juga relatif lebih mudah karena proses lelang hanya dilakukan di tingkat desa. Namun, jika tidak hati-hati anggaran tersebut justru rentan terjadi penyalahgunaan.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Adhi Sadono mengatakan pencairan Bankeu dilakukan secara bersamaan.

Hanya saja, untuk Bankeu memang harus ada surat keputusan (SK) yang harus ditandatangani kepala daerah untuk pelaksanaannya. "Kami sudah melaksanakan semua tahapan," jelasnya.

Untuk SK juga sudah dilakukan proses agar bisa ditandatangani kepala daerah. Semuanya perlu dilakukan pertimbangan, namun yang jelas pihaknya sudah melakukan semua tahapan tersebut.

Sedangkan keputusan ditunda atau tidak pelaksanaan Bankeu tersebut, bukan menjadi ranahnya. "Yang jelas semua proses untuk bankeu sudah kami laksanakan, karena semua harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada," imbuhnya. *tom-Tj*